



KAJIAN FISKAL REGIONAL



Rumah Khusus Nelayan Bala I
Polman



Gedung Baru
RSUD Polman

Triwulan I
2019

Tim Penyusun:

Penanggung jawab: Kakanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat

Ketua Tim: Kabid PPA II **Editor & Grafis:** Budy Prastowo

Kontributor: Arvis Ali Baso | Christmas Kurnianto |

Mardiyana | Hepy Yudha Hariyanto | Ronald Rannu

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
1.1 Produk Domestik Regional Bruto	1
1.2 Inflasi.....	2
1.3 Indikator Kesejahteraan.....	3
BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	5
2.1 Pendapatan Negara.....	5
2.2 Belanja Negara	8
2.3 Prognosis Realisasi APBN	11
BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	12
3.1 Pendapatan Daerah.....	13
3.2 Belanja Daerah	15
3.3 Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019.....	16
BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	17
4.1 Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	17
4.2 Pendapatan Konsolidasian	17
4.3 Belanja Konsolidasian	19
4.4 Analisis Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB	21
BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	22
5.1 Tantangan dan Peluang dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulbar di Tengah Volatilitas Harga CPO	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Sulbar s.d. Triwulan I Tahun 2018-2019.....	5
Tabel 2.2	Perkembangan Aset dan Realisasi PNBPN Satker pengguna PNBPN	9
Tabel 2.3	Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Sulbar s.d. Triwulan IV 2019	11
Tabel 3.1	Realisasi APBD Lingkup Sulbar s.d. Triwulan I Tahun 2018-2019	12
Tabel 3.2	Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Sulbar s.d. Triwulan IV 2019.....	16
Tabel 4.1	LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Sulbar s.d. Triwulan I Tahun 2019	17
Tabel 4.2	Perbandingan Pertumbuhan PDRB dan Realisasi Pendapatan Konsolidasian Prov. Sulbar Triwulan I 2018-2019.....	19
Tabel 4.3	Kontribusi Konsumsi dan Investasi Pemerintah terhadap PDRB Sulbar s.d. Triwulan I 2019	21

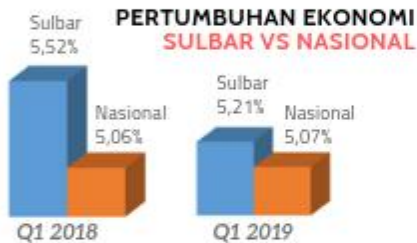
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Pertumbuhan PDRB Prov. Sulbar per Triwulan Tahun 2018 - 2019	1
Grafik 1.2	Struktur PDRB Sulbar Sisi Produksi dan Pengeluaran Triwulan I 2019	1
Grafik 1.3	Struktur PDRB Sulbar Sisi Produksi dan Pengeluaran Triwulan I 2019	2
Grafik 1.4	Tren Tingkat Kemiskinan Sulbar 2016 - 2018.....	3
Grafik 1.5	Tren TPT Sulbar 2016 - 2019	3
Grafik 1.6	IPM Sulbar per kabupaten tahun 2017-2018.....	4
Grafik 2.1	Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Sulbar Triwulan I 2018-2019	6
Grafik 2.2	Realisasi Penerimaan PPh Lingkup Sulbar Triwulan I 2019	6
Grafik 2.3	Realisasi Penerimaan PPN Lingkup Sulbar Triwulan I 2019.....	6
Grafik 2.4	Realisasi Penerimaan PPnBM Lingkup Sulbar Triwulan I 2019	7
Grafik 2.5	Realisasi Penerimaan Pajak Lainnya Lingkup Sulbar Triwulan I 2019	7
Grafik 2.6	Realisasi Penerimaan PNBP per Kabupaten Lingkup Sulbar Triwulan I 2019	8
Grafik 2.7	Tren Persentase Realisasi Belanja APBN Lingkup Sulbar Triwulan I 2019	8
Grafik 2.8	Tren Persentase Realisasi Belanja TKDD Lingkup Sulbar Triwulan I 2019	9
Grafik 2.9	Perbandingan KUR Per Sektor Ekonomi Triwulan I 2018 dan 2019	10
Grafik 2.10	Penyaluran UMi Lingkup Sulbar Triwulan I 2019	11
Grafik 3.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per Kabupaten Triwulan I 2019	13
Grafik 3.2	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah per Kabupaten Triwulan I 2019	13
Grafik 3.3	Realisasi Pendapatan Transfer Lingkup Sulbar Triwulan I 2019	14
Grafik 3.4	Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Barang, dan Modal Lingkup Sulbar s.d.Triwulan I 2019	15
Grafik 3.5	Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan s.d. Triwulan I 2019.....	15
Grafik 4.1	Proporsi Pendapatan Konsolidasian Sulbar Triwulan I Tahun 2019	18
Grafik 4.2	Perubahan Realisasi Pendapatan Konsolidasian Sulbar TW I 2018-2019	18
Grafik 4.3	Proporsi Belanja Konsolidasian Sulawesi Barat Triwulan I 2019.....	20
Grafik 4.4	Perubahan Realisasi Belanja Konsolidasian Sulbar Tw I 2018-2019.....	20
Grafik 4.5	Korelasi Belanja Pemerintah Konsolidasian dengan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Sulbar s.d. Triwulan I 2019	21
Grafik 5.1	Perkembangan Laju PDRB Sulbar dan Harga CPO	22
Grafik 5.2	Perkembangan Kontribusi Pengeluaran Pemerintah lingkup Sulbar s.d. Triwulan I Periode 2016-2019.....	23
Grafik 5.3	Perkembangan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa s.d. April 2019	24

KFR PROVINSI SULAWESI BARAT

Triwulan I 2019

INDIKATOR MAKROEKONOMI



INFLASI
Sulbar per Maret 2019 = 2,48% (yoy)
Target RPJMD 2019 = 2,89% (yoy)
Nasional per Maret 2019 = 0,96% (yoy)



TINGKAT KEMISKINAN
Sulbar per September 2018 = 11,22%
Target RPJMD 2019 = 9,91%
Nasional per September 2018 = 9,66%



TINGKAT PENGANGGURAN
Sulbar per Februari 2019 = 1,45%
Target RPJMD 2019 = 2,77%
Nasional per Februari 2019 = 5,01%



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Sulbar Tahun 2018 = 65,10
Target RPJMD 2019 = 67,64
Nasional Tahun 2018 = 71,39



BERITA/ISU FISKAL

VOLATILITAS HARGA CPO
World Bank memproyeksikan penurunan harga CPO sebesar 6,05% (yoy).

Perkembangan laju PDRB Sulbar linear dengan dinamika perubahan harga CPO.

PELUANG FISKAL REGIONAL
Perkembangan pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah selaras dengan kontribusi pemerintah terhadap PDRB Sulbar.

Kinerja penyerapan anggaran konsolidasian Sulbar meningkat sebesar 0,96%. Terdapat potensi peningkatan kontribusi pemerintah terhadap PDRB Sulbar.

TANTANGAN FISKAL
Sampai dengan April 2019, alokasi DAK Fisik lingkup Sulbar belum tersalur.

Kinerja penyaluran Dana Desa lingkup Sulbar s.d. TW 1 2019 mengalami penurunan sebesar 28,86 persen (yoy).

Sinergi antar pengelola fiskal lingkup Sulbar perlu ditingkatkan.

PERKEMBANGAN APBN

REALISASI PENDAPATAN NEGARA

Realisasi Rp87,94 M Target/Pagu Rp811,83 M

- Pajak = Rp68,44 M (77,83%)
- PNBPN = Rp19,5 M (22,17%)

REALISASI BELANJA NEGARA

Realisasi Rp2,21 T Pagu Rp10,68 T

- Belanja Pemerintah Pusat = Rp440,33 M (19,85%)
- Transfer ke Daerah & Dana Desa = Rp1.778,33 M (80,15%)

PENYALURAN KREDIT PROGRAM

- KUR = Rp244,12 M (8.284 debitur)
- UMi = Rp7,27 M (2.713 debitur)

PERKEMBANGAN APBD

REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Rp1,77 T Pagu Rp8,32 T

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp76,17 M (4,32%)
- Pendapatan Transfer = Rp1. 619,5 M (91,75%)

REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Rp697,93 M Pagu Rp8,41 T

ANGGARAN KONSOLIDASIAN



REALISASI PENDAPATAN

- Daerah = Rp165,91 M (65,36%)
- Pusat = Rp87,94 M (34,64%)



REALISASI BELANJA

- Daerah = Rp697,93 M (61,32%)
- Pusat = Rp440,33 M (38,68%)



KANWIL DJEN
PERBENDAHARAAN
SULAWESI BARAT

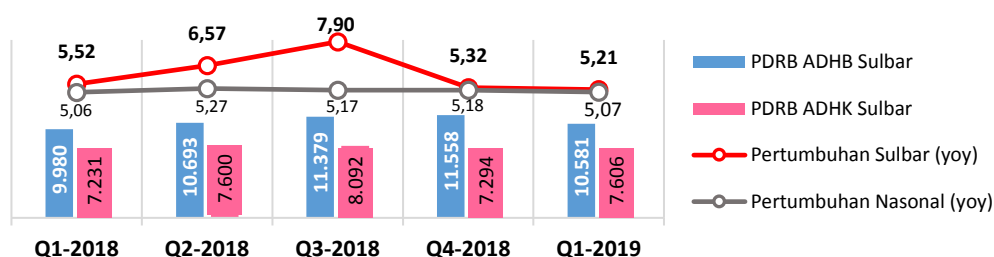


BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Ekonomi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Triwulan I 2019 tumbuh sebesar 5,21 persen (*yoy*), lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (5,07 persen). Namun apabila dibandingkan dengan Triwulan I 2018, pertumbuhan Sulbar tersebut tampak melambat dan masih membutuhkan kerja keras dalam upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam RKP dan RPJMD Sulbar sebesar 7,3-7,6 persen.

Grafik 1.1 Pertumbuhan PDRB Prov. Sulbar per Triwulan Tahun 2018 - 2019



Sumber: BPS Sulbar dan Nasional. 2019 (diolah)

Dari sisi produksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 10,38 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi sebesar 13,97 persen terjadi pada komponen pengeluaran Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR). Pertumbuhan tersebut didorong oleh tingginya aktivitas partai politik menjelang Pemilihan Umum yang salah satunya terkonfirmasi pada aktivitas industri percetakan yang tumbuh hingga 43,09 persen (*yoy*), disinyalir sebagai dampak tingginya permintaan baliho dan alat peraga kampanye lainnya.

Grafik 1.2 Struktur PDRB Sulbar Sisi Produksi dan Pengeluaran Triwulan I Tahun 2019



Sumber: BPS Sulbar (diolah)

Struktur pembentuk PDRB (ADHB) Sulbar yang sebesar Rp10,58 triliun dilihat dari sisi produksi masih bertumpu pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan *share* sebesar Rp3,03 triliun (42 persen). Walaupun sektor ini hanya tumbuh 5,8 persen (*yoy*), namun karena kontribusinya yang besar menempatkannya pada posisi sebagai

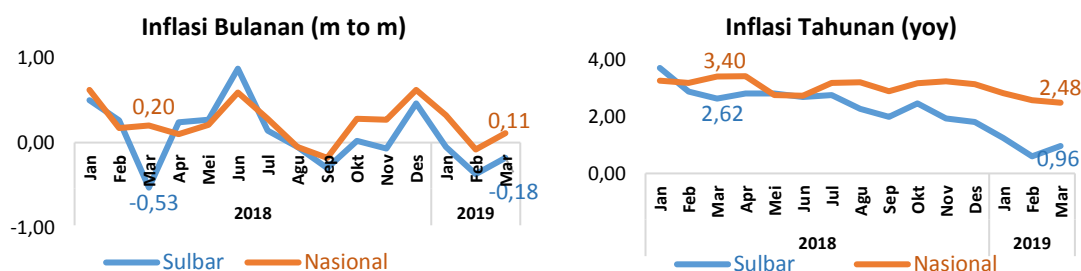
penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulbar, yakni sebesar 2,3 persen. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah Sulbar dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi dapat diarahkan pada sektor Pertanian.

Sementara dari sisi konsumsi, lebih dari separuh PDRB Sulbar ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 5,60 triliun (52,92 persen). Pada kuartal pertama tahun ini, belanja pemerintah yang masih rendah menyumbang hanya sembilan persen dari total PDRB (*share*-nya turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 10 persen). Hal tersebut antara lain berhubungan dengan penurunan realisasi Belanja Hibah dan perubahan mekanisme pencairan dan persyaratan DAK Fisik.

1.2 Inflasi

Secara bulanan, Sulbar mengalami deflasi selama kuartal pertama, yang dipicu oleh penurunan indeks harga pada kelompok bahan makanan. Deflasi terdalam terjadi pada Februari sebesar -0,37 persen lebih didorong oleh penurunan harga pada komoditas bawang merah dengan andil 0,07 persen. Pemicu lainnya adalah penurunan harga ikan layang dan ikan cakalang dengan andil masing-masing sebesar 0,06 persen dan 0,04 persen sehubungan dengan adanya migrasi ikan. Sementara itu, deflasi pada Maret sebesar -0,18 persen dipicu oleh penurunan harga komoditas beras karena adanya panen raya.

Grafik 1.3 Struktur PDRB Sulbar Sisi Produksi dan Pengeluaran Triwulan I Tahun 2019



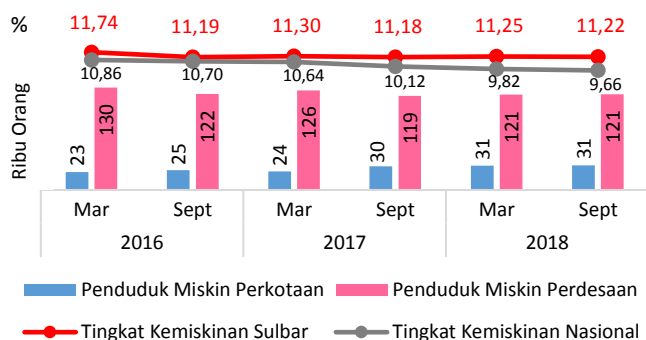
Sumber: BPS Sulbar dan Nasional, 2018-2019 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Inflasi Sulbar mulai kembali menanjak ke angka 0,96 persen (*yoy*) di akhir triwulan I 2019 setelah menyentuh titik terendah 0,60 pada Februari. Inflasi Sulbar selama tiga bulan pertama selalu lebih rendah daripada rata-rata inflasi nasional, dan masih relatif aman berada di bawah angka target inflasi Sulbar sesuai RPJMD yang diharapkan terkendali sampai dengan 2,89 persen. Pemda Sulbar melalui TPID perlu mengantisipasi kenaikan harga yang biasanya selalu terjadi menjelang bulan puasa hingga setelah pelaksanaan Idul Fitri, terutama dengan menjaga stok dan distribusi komoditas pada kelompok bahan makanan.

1.3 Indikator Kesejahteraan

Secara umum, selama tiga tahun terakhir tren kemiskinan Sulbar mengalami penurunan. Data terakhir BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Sulbar pada periode September 2018 kembali menanjak ke level 11,22 persen setelah mencapai titik terendah 11,18 persen pada September 2017.

Grafik 1.4 Tren Tingkat Kemiskinan Sulbar 2016 - 2018



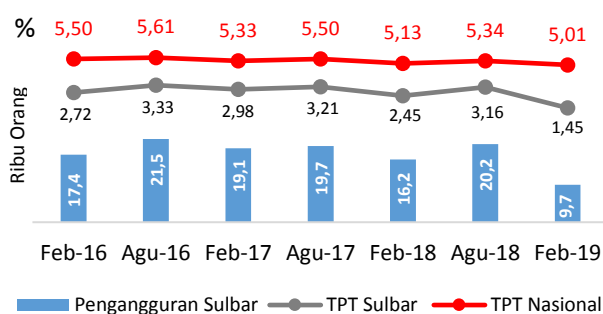
Sumber: BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Kondisi tersebut kontras dengan perkembangan tingkat kemiskinan nasional yang konsisten mengalami penurunan hingga mencapai level 9,66 persen. Pada tahun 2019 ini, pemda Sulbar harus bekerja keras agar tingkat kemiskinan dapat ditekan menuju target di RPJMD sebesar 9,91 persen.

Dari sisi ketenagakerjaan, Sulbar mencatatkan prestasi dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) paling rendah kedua di tingkat nasional, yakni 1,45 persen. Angka tersebut masih berada pada jalur sesuai target pemerintah Sulbar dalam RPJMD sebesar 2,77 persen.

Pada periode Februari 2019, jumlah pengangguran sebanyak 9,68 ribu orang, berkurang 6,56 ribu orang (yoy). Pengurangan yang cukup drastis tersebut salah satunya dipengaruhi oleh periode panen raya yang banyak menyerap tenaga kerja.

Grafik 1.5 Tren TPT Sulbar 2016 - 2019

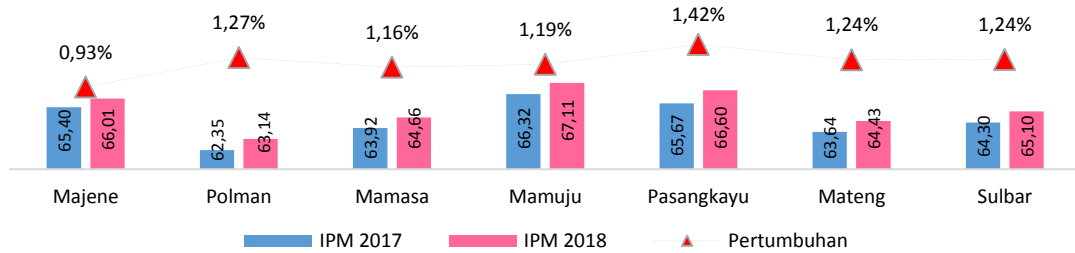


Sumber: BPS Sulbar dan Nasional, 2019 (diolah)

Secara umum profil tenaga kerja Sulbar mengalami perbaikan yang ditunjukkan oleh peningkatan tingkat pendidikan dan kenaikan yang cukup signifikan pada kelompok pekerja penuh. Dilihat dari lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja, sektor pertanian masih menjadi sektor paling dominan, walaupun sektor perdagangan mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 29 persen (yoy). Meskipun secara umum kondisi ketenagakerjaan Sulbar membaik, perlu menjadi catatan bagi pemda bahwa jumlah pekerja dalam kelompok pekerja yang tidak dibayar masih cukup tinggi (21,65 persen).

Selanjutnya dari sisi pembangunan manusia, data BPS terakhir menunjukkan capaian IPM Sulbar tahun 2018 sebesar 65,10. Artinya, IPM Sulbar masih berada dalam kategori “sedang” ($60 \leq \text{IPM} \leq 70$). Walaupun IPM Sulbar mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sebesar 1,24 persen (yoy), akan tetapi angka tersebut belum mencapai target RPJMD Sulbar tahun 2018 sebesar 66,62 dan masih terpaut jauh dibawah capaian rata-rata IPM provinsi lain di Indonesia sebesar 71,39.

Grafik 1.6 IPM Sulbar per kabupaten tahun 2017-2018



Sumber: BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Dilihat dari perbandingan antar kabupaten, Mamuju sebagai ibukota provinsi mencatatkan IPM tertinggi. Namun dari sisi pertumbuhan, kabupaten Pasangkayu dan Polewali Mandar menunjukkan pertumbuhan IPM tertinggi masing-masing sebesar 1,42 persen dan 1,27 persen, yang secara khusus didorong oleh kenaikan pada komponen pengetahuan dan ekonomi.

Kenaikan pada aspek pengetahuan yang tampak pada angka Rata-rata Lama Sekolah berkorelasi dengan kebijakan ekspansi belanja secara signifikan pada fungsi Pendidikan. Ke depan, selain pada aspek pendidikan, upaya pemda Sulbar dalam mencapai target IPM tahun 2019 sebesar 67,64 juga perlu diarahkan pada ekspansi yang disertai dengan efektivitas dan efisiensi belanja fungsi kesehatan, guna mendorong laju IPM dari komponen peningkatan Umur Harapan Hidup.

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam Miliar Rupiah)

URAIAN	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	775,00	84,43	811,83	87,94
I. Penerimaan Dalam Negeri	775,00	84,43	811,83	87,94
1. Penerimaan Pajak	745,26	70,04	776,74	68,44
2. PNBPN	29,74	14,39	35,09	19,50
B. BELANJA NEGARA	10.275,61	2.074,57	10.686,23	2.218,66
I. Belanja Pemerintah Pusat	3.653,31	379,66	3.471,11	440,33
1. Belanja Pegawai	1.064,09	178,49	978,86	189,02
2. Belanja Barang	1.494,29	133,46	1.256,75	179,99
3. Belanja Modal	1.087,18	67,38	1.229,72	70,67
4. Belanja Bantuan Sosial	7,75	0,33	5,78	0,65
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	6.622,30	1.694,92	7.215,12	1.778,33
1. Transfer ke Daerah	6.150,42	1.600,54	6.654,90	1.698,63
a. Dana Perimbangan	5.959,92	1.522,666	6.486,73	1.615,48
1) Dana Alokasi Umum	4.224,89	1.403,84	4.399,27	1.457,42
2) Dana Bagi Hasil	100,38	14,24	91,67	10,75
3) Dana Alokasi Khusus	1.634,65	104,59	1.995,79	147,32
a) DAK Fisik	841,59	0,00	1.086,71	0,00
b) DAK Non Fisik	793,07	104,59	909,08	147,32
b. Dana Non Perimbangan	190,50	77,88	168,16	83,15
2. Dana Desa	471,88	94,38	560,23	79,71
C. SURPLUS/DEFISIT	(9.500,61)	(1.990,14)	(9.874,40)	(2.130,72)

Sumber: SPAN, Monev PA, SIMTRADA; KPP Pratama Mamuju; KPP Pratama Majene (diolah)

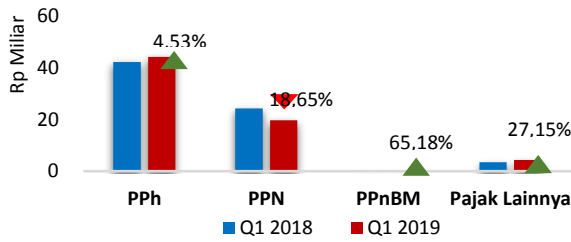
Sampai dengan triwulan I 2019, realisasi pendapatan APBN sebesar Rp87,94 miliar atau 10,83 persen dari target realisasi. Realisasi ini meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp84,43 miliar. Proporsi realisasi pendapatan APBN sampai dengan triwulan I 2019 didominasi oleh Pendapatan Pajak sebesar 77,83 persen, dan sisanya penerimaan PNBPN sebesar 22,17 persen. Sementara itu, realisasi Belanja APBN sampai dengan triwulan I 2019 sebesar Rp2.218,66 miliar atau 20,76 persen dari total pagu. Realisasi tersebut meningkat 6,95 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Proporsi realisasi belanja APBN yaitu 19,85 persen merupakan Belanja Pemerintah Pusat dan 80,15 persen merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

2.1 Pendapatan Negara

2.1.1 Penerimaan Perpajakan

Total pagu pendapatan perpajakan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp776,74 miliar. Dari total pagu tersebut penerimaan perpajakan pada triwulan I 2019 sebesar

Grafik 2.1 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Lingkup Sulbar Triwulan I 2018 - 2019



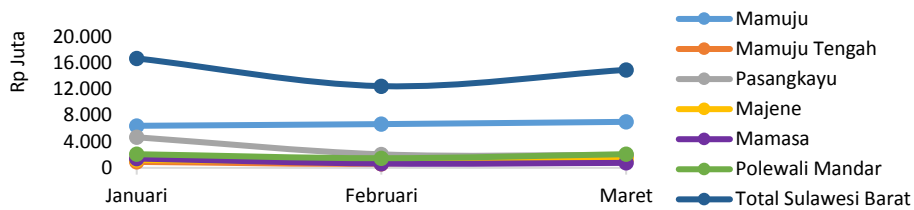
Sumber: OMSPAN (diolah)

Rp68,44 miliar. Penerimaan ini lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 70,04 miliar. Hal ini disebabkan oleh belum berjalannya beberapa proyek yang dibiayai dari APBN yang terealisasi di triwulan I 2019.

2.1.1.1 Pajak Penghasilan (PPh)

Total penerimaan PPh pada triwulan I 2019 di wilayah Sulbar mencapai Rp44,18 miliar. Angka ini lebih tinggi 4,53 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini berkorelasi dengan peningkatan Belanja Pegawai pemerintah konsolidasian triwulan I 2019 sebesar 1,43 persen (yoy). Realisasi kinerja PPh tertinggi berada di Kabupaten Mamuju sebesar Rp20,07 miliar sedangkan realisasi terendah berada di Kabupaten Mamasa sebesar Rp2,83 miliar.

Grafik 2.2 Realisasi Penerimaan PPh Lingkup Sulbar Triwulan I 2019

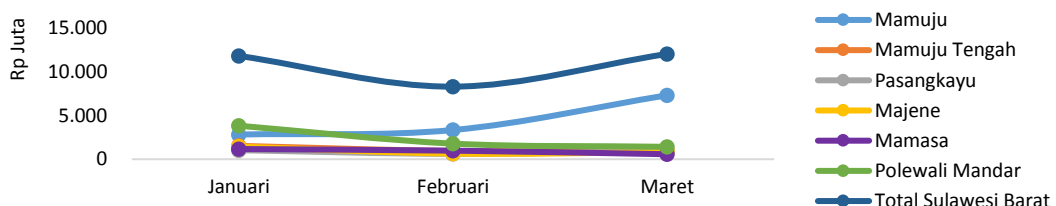


Sumber: OMSPAN (diolah)

2.1.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berbanding terbalik dengan kinerja penerimaan PPh, tren penerimaan PPN di wilayah Sulbar pada triwulan I 2019 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan PPN triwulan I 2019 mencapai Rp19,71 miliar dimana kontribusi tertinggi berasal dari Kabupaten Mamuju dengan sumbangan sebesar Rp13,41miliar. Sedangkan penerimaan terendah berada di Kabupaten Pasangkayu sebesar Rp2,58 miliar.

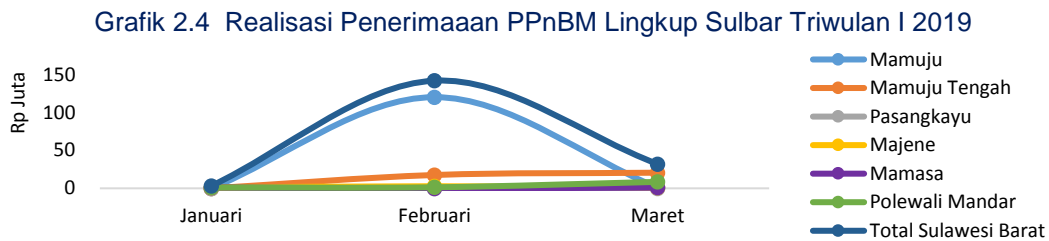
Grafik 2.3 Realisasi Penerimaan PPN Lingkup Sulbar Triwulan I 2019



Sumber: OMSPAN (diolah)

2.1.1.3 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

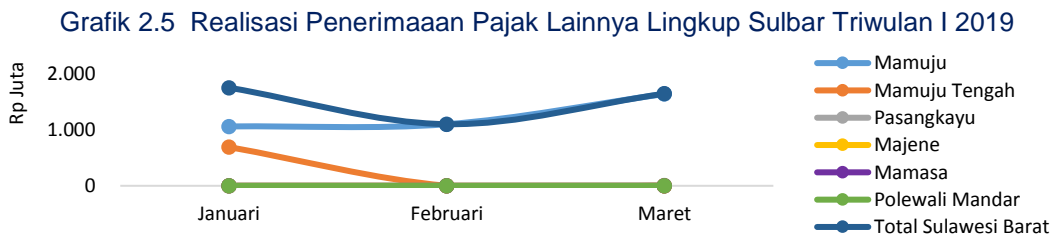
Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Rendahnya hasil atau impor barang mewah di wilayah Sulbar mengakibatkan rendahnya PPnBM yang diterima. Dibandingkan dengan penerimaan dari PPh dan PPN maka penerimaan PPnBM jauh lebih kecil. Sampai dengan triwulan I 2019 penerimaan PPnBM hanya mencapai Rp174,85 juta atau 0,25 persen dari total penerimaan pajak di Sulbar. Namun capaian dimaksud lebih tinggi 65 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.



Sumber: OMSPAN (diolah)

2.1.1.4 Pajak Lainnya

Penerimaan dari pajak lainnya pada triwulan I 2019 mencapai Rp4,38 miliar. Penerimaan ini berasal dari PBB dan beberapa jenis pajak lainnya di luar PPh, PPN dan PPnBM. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, penerimaan pajak lainnya meningkat 27,15 persen yaitu sebesar Rp935,64 juta.

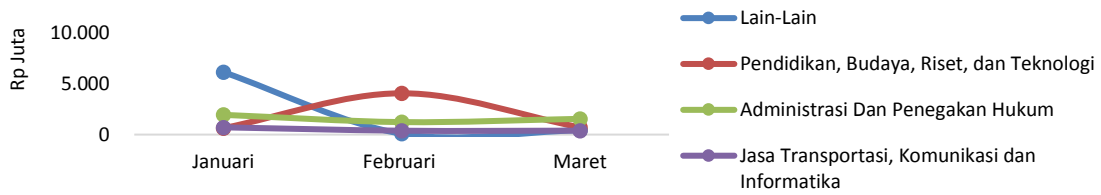


Sumber: OMSPAN (diolah)

2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan PNBPN berkontribusi sebesar 4,32 persen dari total pendapatan APBN lingkup Sulbar sampai dengan triwulan I 2019. Per Maret 2019, realisasi PNBPN lingkup Sulbar tercatat sebesar Rp19,50 miliar, tumbuh 35,52 persen dibandingkan realisasi penerimaan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp14,39 miliar). Pendapatan lain-lain menjadi pendapatan dengan kontribusi terbesar dalam struktur PNBPN Sulbar yang didominasi oleh Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu.

Grafik 2.6 Realisasi Penerimaan PNBPN dari Empat Jenis PNBPN Terbesar per Kabupaten Lingkup Sulbar Triwulan I 2019



Sumber: OMSPAN (diolah)

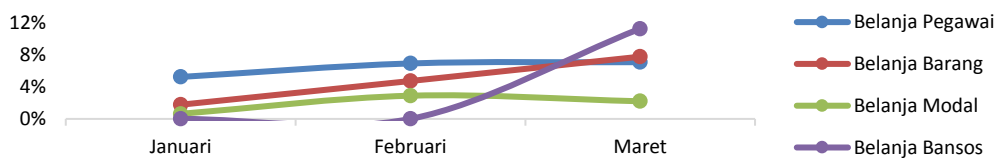
Di antara seluruh jenis pendapatan, hanya kelompok Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN Dan Iuran Badan Usaha, Pendapatan Jasa Lainnya, serta Pendapatan Lain-lain yang mengalami peningkatan realisasi secara *y-on-y*. Kenaikan tersebut berkorelasi dengan pengembalian Belanja Modal pemerintah tahun sebelumnya. Dengan capaian realisasi PNBPN hingga triwulan I 2019 sebesar Rp19,49 miliar, diperkirakan realisasi penerimaan PNBPN Sulbar pada akhir tahun 2019 berpotensi melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp35,09 miliar.

2.2 Belanja Negara

2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat selama triwulan I 2019 sebesar Rp440,33 miliar atau 12,69 persen dari total pagu sebesar Rp3.471,11 miliar. Selama triwulan I 2019 realisasi belanja tumbuh 2,30 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Grafik 2.7 Tren Persentase Realisasi Belanja APBN Lingkup Sulbar Triwulan I Tahun 2019



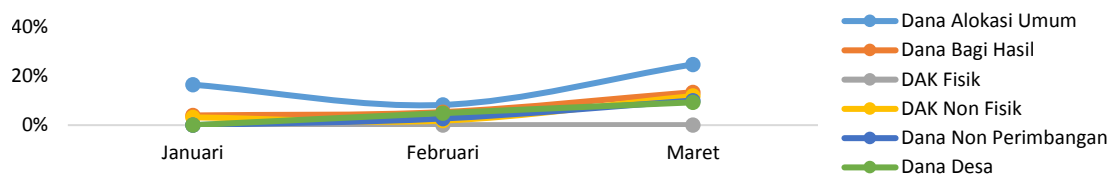
Sumber: OMSPAN (diolah)

Realisasi Belanja Pegawai mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Februari 2019 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp16,54 miliar dibandingkan bulan Januari yang terealisasi sebesar Rp51,46 miliar. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah ASN di lingkungan Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Pertahanan. Sedangkan tren realisasi Belanja Modal cenderung fluktuatif selama triwulan I 2019. Sementara itu, laju realisasi Belanja Barang terlihat konsisten dengan rata-rata realisasi tumbuh sebesar Rp37 miliar setiap bulan selama triwulan I 2019. Belanja Bantuan Sosial mengalami kontraksi pada bulan Maret 2019 dengan realisasi sebesar Rp650,40 juta.

2.2.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8,95 persen dari tahun sebelumnya. Jika diuraikan per jenis transfer, pagu DAK Fisik mengalami peningkatan paling signifikan yaitu sebesar 29,13 persen (yoy). Sementara itu, pagu Dana Bagi Hasil dan Dana Non Perimbangan menurun masing-masing sebesar -8,67 persen (yoy) dan -11,73 persen (yoy).

Grafik 2.8 Tren Persentase Realisasi Belanja TKDD Lingkup Sulbar Triwulan I Tahun 2019



Sumber: OMSPAN (diolah)

Selanjutnya dari sisi realisasi anggaran, realisasi DAK Non Fisik mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 40,85 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi Dana Bagi Hasil dan Dana Desa mengalami penurunan masing-masing sebesar -24,50 persen (yoy) dan -15,54 persen (yoy). Dana Desa tahap I yang seyogyanya dapat disalurkan pada bulan Januari 2019 baru dapat terealisasi pada bulan Februari dan Maret 2019. Terdapat catatan bahwa hingga saat ini Kabupaten Polewali Mandar menjadi satu-satunya kabupaten yang belum mencairkan Dana Desa Tahap I sehubungan dengan belum ditetapkannya peraturan bupati mengenai pembagian rincian dana desa.

2.2.3 Satuan Kerja yang Berpotensi Menjadi BLU

Terdapat dua satker pengguna PNBPN yang secara persyaratan substantif berpotensi untuk menjadi satker BLU Pusat yaitu Poltekkes Mamuju dan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) jika dilihat dari perkembangan nilai aset. Namun sangat disayangkan, realisasi penerimaan PNBPN triwulan I 2019 pada kedua satker tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut berkorelasi dengan belum selesainya proses penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2019. Untuk mendorong akselerasi penerimaan PNBPN pada kuartal berikutnya, upaya promosi kepada siswa Sekolah Menengah Atas di seluruh wilayah Sulbar perlu digencarkan agar jumlah mahasiswa baru terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2.2 Perkembangan Aset dan Realisasi PNBPN Satker pengguna PNBPN periode Triwulan I tahun 2018 – 2019 (dalam juta Rp.)

Nama Satker	Aset			PNBPN		
	TW I 2018	TW I 2019	Per-tumbuhan	TW I 2018	TW I 2019	Per-tumbuhan
Unsulbar	134.664,63	137.175,79	1,86%	4.001,12	3.809,26	-4,80%
Poltekkes Mamuju	62.425,55	86.840,86	39,11%	3.413,36	3.103,43	-9,07%

Sumber: OMSPAN; Laporan BMN pada Neraca Satker (diolah)

2.2.4 Manajemen Investasi Pusat dan Kredit Program

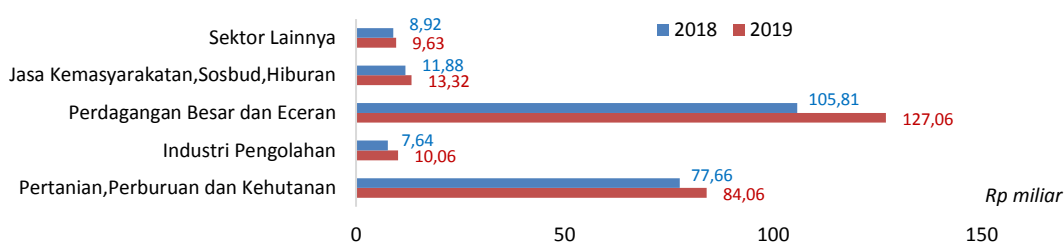
2.2.4.1 Penerusan Pinjaman

Sampai dengan triwulan I tahun 2019 tidak terdapat penerusan pinjaman di wilayah Sulbar. Seluruh penerusan pinjaman ke Sulbar yang pernah ada sebelum tahun 2019 telah berstatus lunas.

2.2.4.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sampai dengan triwulan I 2019, realisasi KUR di wilayah Sulbar mencapai Rp244,12 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 8.284 orang. Total realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan total realisasi pada triwulan I 2018 sebesar Rp212,23 miliar. Peningkatan penyaluran KUR di triwulan I tahun 2019 hampir terjadi di seluruh sektor ekonomi yang ada di Sulbar. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran KUR di Sulbar dengan capaian sebesar 52,05 persen terhadap total penyaluran KUR. Sedangkan sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan berada di posisi terbesar kedua yaitu sebesar 34,43 persen. Realisasi penyaluran KUR di sektor tersebut sampai dengan triwulan I 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp6,40 miliar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Grafik 2.9 Perbandingan KUR Per Sektor Ekonomi Triwulan I 2018 dan 2019



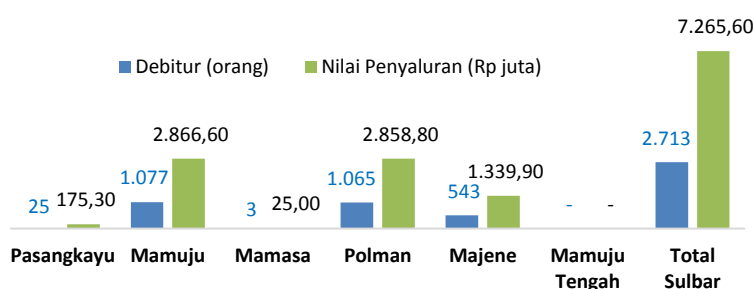
Sumber: SIKP (diolah, diakses pada tanggal 06 Mei 2019)

Guna mencapai target nasional sebesar 60 persen dari total penyaluran KUR untuk sektor produksi, Pemerintah Pusat perlu mendorong perbankan di daerah agar memprioritaskan penyaluran KUR sektor produksi di bidang pertanian, perburuan dan kehutanan maupun sektor industri pengolahan di daerah termasuk di wilayah Sulbar.

2.2.4.3 Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Grafik 2.10 Penyaluran UMi Lingkup Sulbar Triwulan I 2019



Sumber: Direktorat SMI DJPb (diolah)

Sampai dengan triwulan I 2019, penyaluran Pembiayaan UMi di wilayah Sulbar terealisasi sebesar Rp7,27 miliar dengan total debitur sebanyak 2.713 orang. Penyaluran pembiayaan UMi terkonsentrasi di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar dengan kontribusi masing-masing sebesar 39,45 persen dan 39,35 persen terhadap total penyaluran UMi di Sulbar. Hal tersebut berkorelasi dengan status kedua daerah tersebut sebagai pusat perdagangan di Sulbar.

Penyaluran pembiayaan Umi di Sulbar dilaksanakan oleh PT PNM (Persero), PT Pegadaian dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida).

Sampai dengan

2.3 Prognosis Realisasi APBN

Tabel 2.3 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Sulbar s.d. Triwulan IV 2019 (dalam Rp miliar)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan s.d. Triwulan IV	
		Rp.	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp.	% Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Negara	811,83	87,94	10,83%	680,39	83,81%
Belanja Negara	10.686,23	2.218,66	20,76%	10.275,88	96,16%
Surplus/Defisit	(9.874,40)	(2.130,72)		(9.247,58)	

Sumber: OMSPAN, MONEV PA (diolah)

Berdasarkan tren rata-rata realisasi APBN Sulbar selama empat tahun terakhir, pendapatan dan belanja negara lingkup Sulbar sampai dengan akhir triwulan IV 2019 diproyeksikan akan terealisasi masing-masing sebesar Rp680,39 miliar dan Rp10.275,88 miliar. Prognosis realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,81 persen dan 0,70 persen dibanding tahun sebelumnya.

Proyeksi penurunan realisasi Belanja APBN tersebut berkorelasi dengan menurunnya kinerja penyerapan alokasi DAK Fisik dan Dana Desa Triwulan I 2019 dibandingkan periode yang sama pada sebelumnya. Secara tidak langsung hal tersebut diprediksi akan berpengaruh terhadap penurunan realisasi pendapatan negara lingkup Sulbar, khususnya pada penerimaan perpajakan yang selama ini didominasi oleh penerimaan PPN dan PPh.

BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Tabel 3.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam Juta Rp)

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Pagu	Realisasi s.d. Tw I	Pagu	Realisasi s.d. Tw I
PENDAPATAN				
PAD	750.017	60.899	821.889	76.170
Pajak Daerah	359.877	49.480	381.557	54.573
Retribusi Daerah	101.146	5.839	130.445	10.635
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	28.006	-	36.453	-
Lain-Lain PAD yang Sah	260.989	5.581	273.434	10.961
Pendapatan Transfer	6.313.645	1.601.476	6.800.761	1.619.499
Dana Perimbangan	5.989.869	1.522.664	6.486.529	1.531.295
Dana Bagi Hasil	100.380	14.237	91.673	9.354
Dana Alokasi Umum	4.179.662	1.403.838	4.399.268	1.385.514
Dana Alokasi Khusus Fisik	841.590	-	1.086.709	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	868.238	104.590	908.879	136.427
Non Dana Perimbangan	189.944	77.875	168.162	71.466
Transfer Dana Lainnya	189.944	77.875	168.162	71.466
Transfer Pemerintah Daerah	133.831	937	146.071	16.738
Bagi Hasil Pajak	129.668	937	146.071	16.738
Transfer Lainnya	4.163	-	-	-
Dana Desa	472.772	94.376	560.227	69.173
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	58.796	9	140.850	311
Pendapatan Hibah	13.200	-	139.650	232
Pendapatan Lainnya	45.596	9	1.200	79
JUMLAH PENDAPATAN	7.595.230	1.756.760	8.323.727	1.765.153
BELANJA DAERAH	6.926.910	645.225	7.278.938	645.242
Belanja Pegawai	2.680.689	453.678	3.015.980	452.189
Belanja Barang	1.918.795	83.312	2.024.359	134.608
Belanja Bunga	28.333	4.430	21.958	5.330
Belanja Hibah	393.162	63.046	344.278	7.696
Belanja Bantuan Sosial	31.530	7.203	33.686	4.321
Belanja Modal	1.861.851	33.525	1.814.775	40.798
Belanja Tidak Terduga	12.550	30	23.903	299
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	931.069	53.037	1.133.765	52.684
Transfer Dana Desa	472.268	23.330	560.227	16.945
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda/Desa	265.458	29.708	344.488	1.500
Transfer Bagi Hasil Pajak	147.764	-	153.971	34.239
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	45.579	-	75.079	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.857.979	698.262	8.412.703	697.925
SURPLUS/DEFISIT	(262.749)	1.058.498	(88.976)	1.067.228

Sumber: BPKAD, <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id> (diolah)

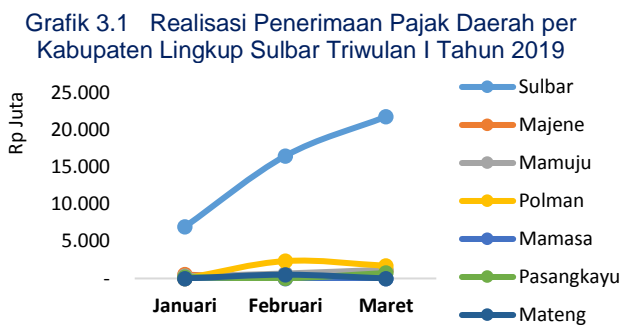
Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat Rp15,27 miliar atau 25,07 persen (yoy). Meskipun demikian, pendapatan Dana Perimbangan masih mendominasi sebesar 86,75 persen dari total pendapatan. Diperlukan upaya pengembangan potensi dan perbaikan pengelolaan sektor pariwisata dan UMKM agar dapat mengakselerasi penerimaan PAD yang pada akhirnya akan meningkatkan rasio kemandirian daerah.

Realisasi Belanja Daerah tergolong cukup rendah yakni mencapai 8,86 persen (dibawah 15 persen), bahkan turun 0,45 persen dari periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Pegawai hingga Rp1,48 miliar atau 0,33 persen (yoy). Keterlambatan pembayaran gaji/tunjangan dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja (tunjangan kinerja) menjadi pemicu rendahnya penyerapan Belanja Pegawai di Sulbar hingga triwulan I tahun 2019.

3.1 Pendapatan Daerah

3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

3.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah



Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)

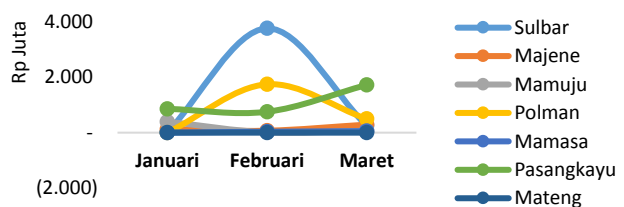
Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan Pajak Daerah yakni sebesar Rp45,22 miliar atau 82,87 persen. Melonjaknya realisasi Pajak Daerah tersebut didorong oleh naiknya pendapatan dari

pajak kendaraan bermotor hingga 13,64 persen, BBNKB 8,89 persen, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor 54,48 persen. Di sisi lainnya, momentum tumbuhnya industri percetakan dan reproduksi media rekaman hingga 43,09 persen (yoy) dari event penyelenggaraan Pemilu 2019 berkorelasi positif dengan kenaikan realisasi pendapatan pajak reklame hingga Rp147,45 juta atau 80,19 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

3.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan retribusi daerah meningkat hingga 82,14 persen atau sebesar Rp4,79 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari retribusi sektor pelayanan kesehatan yang

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah per Kabupaten Lingkup Sulbar Triwulan I Tahun 2019



Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)

memberikan kontribusi sebesar Rp8,62 miliar atau 81,06 persen terhadap total realisasi retribusi. Di sisi lain, momentum tumbuhnya produksi industri mikro dan kecil triwulan I 2019 hingga 8,11 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, berkorelasi positif dengan

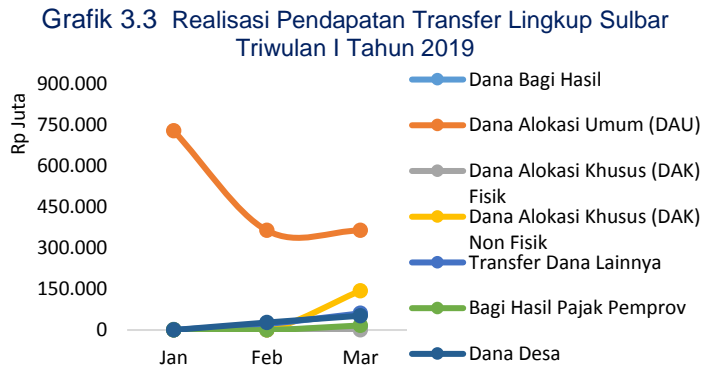
realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp765,73 juta atau 16,20 persen terhadap total realisasi penerimaan retribusi di wilayah Sulbar.

3.1.1.3 Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HKDYD)

Sama halnya dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi pembagian laba atas penyertaan modal pemda pada PMD/BUMD sampai dengan triwulan I 2019 masih nihil. Diperkirakan pembagian laba PMD/BUMD baru akan terealisasi pada triwulan II tahun 2019 berkisar 80-85 persen dari target penerimaan. Di sisi lainnya, berdasarkan hasil audit BPK, pengelolaan dana bergulir dan penyertaan modal di perusahaan daerah (perusda) masih belum efektif dan efisien. Diperlukan langkah yang besar untuk kembali “menyehatkan” perusda diantaranya melalui re-organisasi, *job re-design*, dan peningkatan kemampuan mengaitkan strategi bisnis dengan strategi pengembangan SDM yang profesional dan terlatih.

3.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi DAU mendominasi 85,55 persen dari total seluruh jenis pendapatan transfer di Sulbar. Tingginya realisasi DAU pada bulan Januari disebabkan oleh adanya transfer DAU untuk dua bulan sekaligus (Januari dan Februari). Sementara itu, transfer DAK Non Fisik baru terealisasi pada bulan Maret untuk Dana BOS, Dana BOK, Tunjangan Profesi Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD.



Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)

Kemudian realisasi Dana Desa Tahap I dari RKUN-RKUD dari enam kabupaten di Sulbar, hanya Kabupaten Polewali Mandar yang belum mengajukan penyaluran karena Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa setiap Desa belum ditetapkan. Selanjutnya untuk transfer bagi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp16,73 miliar untuk Kabupaten Pasangkayu, Polman, dan Mamasa.

3.1.3 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

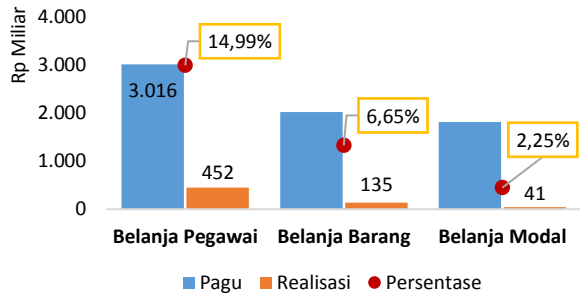
Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp232,24 juta bersumber dari Pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) senilai Rp31,22 juta dan pendapatan lainnya senilai Rp201,02 juta.

3.2 Belanja Daerah

3.2.1 Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Realisasi Belanja Pegawai menurun sebesar Rp1,48 miliar atau 0,33 persen (yoy). Sedangkan Belanja Barang dan Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp51,29 miliar atau 61,57 persen (yoy) dan Rp7,27 miliar atau 21,69 persen (yoy). Rendahnya penyerapan belanja daerah di Sulbar tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.

Grafik 3.4 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Barang, dan Modal Lingkup Sulbar s.d.Triwulan I 2019



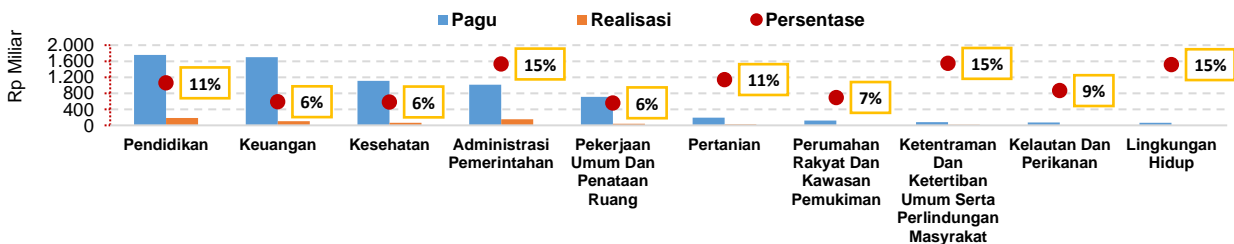
Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)

Pertama, proses persetujuan anggaran terlalu lama sehingga berdampak pada keterlambatan pengesahan APBD dan terbitnya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Diharapkan pembahasan anggaran dan rincian alokasi anggaran dapat diselesaikan dan ditetapkan pada bulan Desember tahun berjalan. Sehingga, mulai Januari tahun berikutnya masing-masing OPD sudah dapat melaksanakan program kerjanya.

Faktor selanjutnya adalah lambatnya proses lelang kegiatan perencanaan (jasa konsultan) proyek fisik berdampak pada lambatnya pelaksanaan proyek fisik. Diharapkan proses tender proyek tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan lebih cepat pada akhir tahun anggaran berjalan, terutama untuk kegiatan perencanaan sudah dapat berjalan dan selesai pada triwulan I 2019.

3.2.2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik 3.5 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (10 Terbesar) Lingkup Sulbar s.d. Triwulan I 2019



Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)

Penyerapan anggaran pada urusan Administrasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup mencapai pada pola penyerapan belanja ideal triwulan I (15 persen). Hal tersebut didorong oleh adanya realisasi dari belanja barang dan jasa mencapai Rp836 miliar dan realisasi

belanja pegawai sebesar Rp181 miliar. Sementara untuk realisasi pada urusan Pendidikan dan urusan yang lain baru digunakan untuk realisasi belanja pegawai.

3.3 Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019

Berdasarkan tren realisasi pendapatan daerah dalam waktu empat tahun terakhir (2015-2018), nampak bahwa realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan I tidak berkorelasi positif terhadap penerimaan daerah sampai dengan akhir tahun anggaran. Namun demikian, kenaikan target pendapatan transfer di tahun 2019 hingga mencapai 7,7 persen (yoy) berpotensi mendorong peningkatan realisasi penerimaan daerah sampai dengan akhir tahun 2019.

Di sisi lain, tren realisasi belanja daerah dalam waktu dua tahun terakhir (2017-2018) menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan I berkorelasi positif terhadap realisasi belanja daerah hingga akhir tahun anggaran. Dengan adanya penurunan kinerja realisasi belanja sampai dengan triwulan I 2019, realisasi belanja daerah sampai dengan akhir tahun 2019 diproyeksikan akan mengalami penurunan.

Berdasarkan tren tersebut, Pendapatan Daerah lingkup Sulbar pada akhir tahun anggaran 2019 diproyeksikan akan terealisasi sebesar 98,59 persen atau meningkat 1,09 persen dibandingkan dengan persentase realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja daerah diperkirakan akan terealisasi sebesar 93,27 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,31 persen dibandingkan capaian persentase penyerapan belanja daerah pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Sulbar s.d. Triwulan IV 2019

Uraian	Pagu	Realisasi s.d.Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d.Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	8.323.727	1.765.153	21,21%	8.206.362	98,59%
Belanja Daerah	8.412.703	697.925	8,30%	7.846.528	93,27%
Surplus/Defisit	(88.976)	1.067.228		359.834	

Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD lingkup Sulbar, Kanwil DJPB Prov. Sulbar (diolah)

BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

4.1 Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Barat s.d. Triwulan I Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	2019				2018
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	87,94	165,91	253,85	73,54%	146,27
Pendapatan Perpajakan	68,44	54,57	123,02	2,92%	119,52
Pendapatan Bukan Pajak	19,50	21,68	41,17	59,48%	25,82
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Transfer	0,00	89,66	89,66	9519,96%	0,93
Belanja Negara	440,33	697,93	1.138,25	5,61%	1.077,79
Belanja Pemerintah	440,33	645,24	1.085,57	5,93%	1.024,75
Transfer	0,00	52,68	52,68	(0,67)%	53,04
Surplus/(Defisit)	(352,38)	(532,02)	(884,40)	(5,06)%	(931,52)
Pembiayaan	0,00	(24,06)	(24,06)	1.103,23%	(2,00)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	24,06	24,06	1102,81%	2,00
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	(352,38)	(556,08)	(908,46)	(2,68)%	(933,51)

Sumber: LKPK Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Prov. Sulbar; LKPD pemda lingkup Sulbar (diolah)

Keterangan: *) Seluruh Belanja Transfer Pempus dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemda.

4.2 Pendapatan Konsolidasian

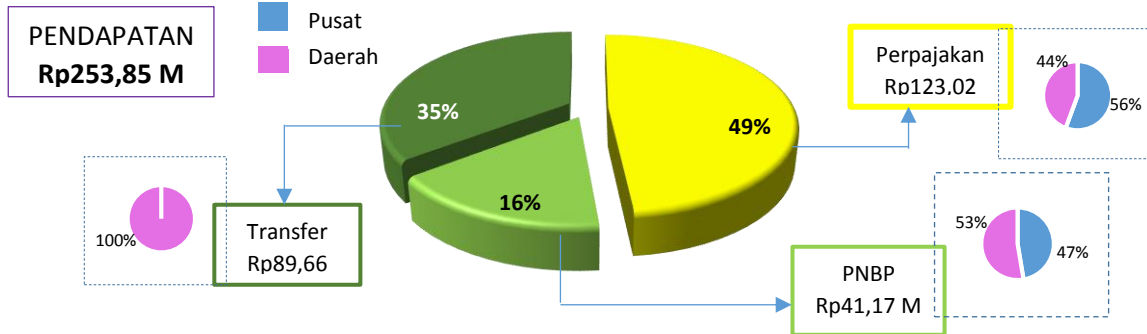
4.2.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Realisasi pendapatan konsolidasian Sulbar pada periode Triwulan I 2019 sebesar Rp253,85 miliar didominasi oleh Pendapatan Perpajakan. Penerimaan perpajakan pemerintah pusat yang memberi kontribusi lebih besar terhadap pendapatan perpajakan, sebagian besar di antaranya masih berasal dari potongan belanja pemerintah pusat. Pajak Penghasilan menjadi kontributor terbesar terhadap realisasi pendapatan pajak pemerintah pusat dengan menyumbang Rp44,18 miliar, sementara realisasi PPN masih relatif rendah (Rp19,71 miliar) seiring dengan belum optimalnya belanja modal pemerintah pusat.

Lain halnya dengan realisasi pendapatan bukan pajak, pendapatan dari pemerintah daerah justru tampak mendominasi. Terdapat dua jenis pendapatan yang memberi andil besar terhadap realisasi pendapatan bukan pajak pemda, yakni pendapatan retribusi dan Lain-lain PAD yang Sah, yang masing-masing terealisasi sebesar Rp10 miliar lebih. Sementara itu, jumlah realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah yang diterima dari pemerintah pusat mencapai Rp1,7 triliun, dimana 82 persen diantaranya berupa realisasi DAU. Namun setelah dieliminasi dengan akun resiprokal, tercatat penerimaan

transfer pemda adalah Rp89,66 miliar. Sedangkan dari sisi pendapatan hibah, sampai dengan akhir triwulan I 2019, belum terdapat realisasi pendapatan.

Grafik 4.1 Proporsi Pendapatan Konsolidasian Sulbar Triwulan I Tahun 2019

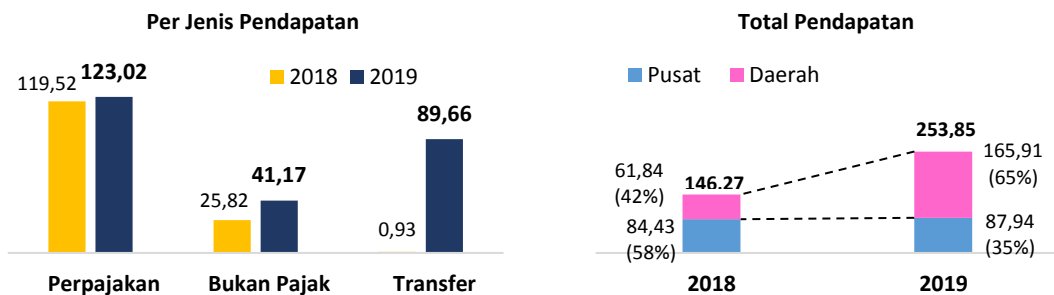


Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar Triwulan I 2019 (diolah)

Secara agregat, realisasi pendapatan konsolidasian Sulbar menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan terjadi pada kelompok pendapatan pemerintah daerah, yang didorong oleh peningkatan realisasi transfer, khususnya realisasi pendapatan DAK Non Fisik.

Selain itu, pendapatan bukan pajak juga memperlihatkan tren menggembirakan. Peningkatan realisasinya terjadi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masing-masing sebesar Rp5,1 miliar (naik 35 persen) dan Rp10,2 miliar (naik 89 persen). Kenaikan drastis pada realisasi pendapatan bukan pajak pemda tersebut disumbang oleh peningkatan realisasi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

Grafik 4.2 Perubahan Realisasi Pendapatan Konsolidasian Sulbar TW I Tahun 2018-2019 (dalam Rp Miliar)



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar (diolah)

Sementara dari sisi pendapatan perpajakan, tren negatif ditunjukkan oleh realisasi pemerintah pusat yang turun sebesar Rp1,6 miliar. Walaupun demikian, peningkatan yang lebih besar pada realisasi penerimaan perpajakan pemerintah daerah mampu menarik tren pendapatan perpajakan Sulbar secara agregat ke arah yang positif dari Rp119,52 miliar menjadi Rp123,02 miliar. Mengingat masih tingginya kontribusi potongan belanja pemerintah terhadap penerimaan perpajakan Sulbar, maka pemerintah perlu mendorong percepatan realisasi belanja, khususnya belanja modal

agar dapat meningkatkan realisasi pendapatan perpajakan pada periode kuartal berikutnya.

4.2.2 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Tabel 4.2 Perbandingan Pertumbuhan PDRB ADHK dengan Realisasi Pendapatan Konsolidasian Prov. Sulbar Triwulan I 2018-2019 (Realisasi dalam Rp Miliar)

Uraian	2018		2019	
	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan
Pendapatan Perpajakan	119,52	-1,04%	123,02	2,92%
PNBP	25,82	-37,53%	41,17	59,48%
Total Pend.Pajak + PNBP	145,34	-10,34%	164,19	12,97%
PDRB ADHK	9.980	5,52%	10.581	5,21%

Sumber: LKPK Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS Prov. Sulbar (diolah)

Berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada periode triwulan I 2019 ini tampak memiliki korelasi yang positif dengan pertumbuhan pendapatannya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas produksi pada berbagai sektor ekonomi telah berkontribusi terhadap realisasi pendapatan Sulbar. Hal itu tampak pada realisasi PNBP yang tumbuh hampir 60 persen. Akan tetapi, di sisi lain pertumbuhan ekonomi dimaksud belum mampu berkontribusi secara berimbang terhadap realisasi pendapatan perpajakan, yang pertumbuhannya tidak sampai tiga persen.

Belum berimbangnya pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan pendapatan pajak selaras dengan masih kecilnya kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Sulbar sehubungan dengan belum optimalnya belanja pemerintah pada kuartal pertama. Kondisi tersebut seolah mengkonfirmasi bahwa penerimaan pajak di Sulbar masih bertumpu pada potongan pajak yang berasal dari belanja pemerintah. Selain mengupayakan akselerasi belanja pemerintah pada kuartal berikutnya, pemerintah juga masih perlu mengejar selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan pendapatan pajak yang berasal dari aktivitas ekonomi dari sektor swasta.

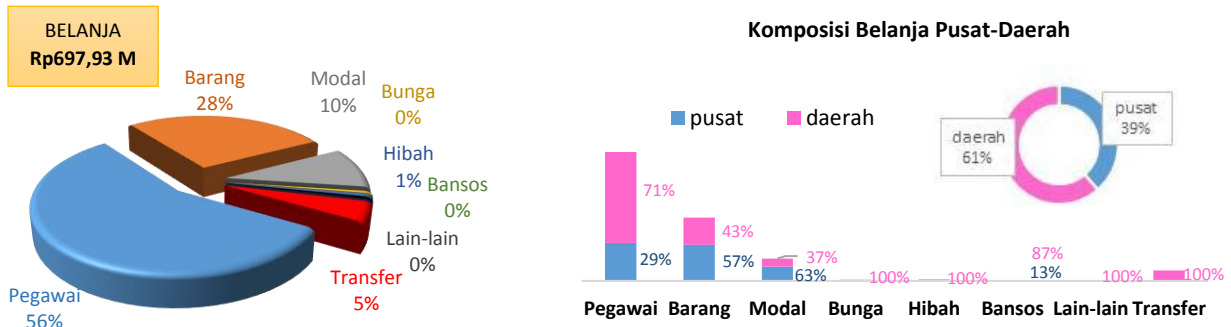
4.3 Belanja Konsolidasian

4.3.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Secara agregat, porsi belanja pemerintah daerah lebih besar dari belanja pemerintah pusat. Dilihat dari komposisi per jenisnya, belanja pegawai dan belanja barang masih mendominasi struktur belanja konsolidasian Sulbar, dengan proporsi masing-masing 56 persen dan 28 persen. Artinya, pemerintah Sulbar hanya memiliki 16

persen dana yang direalisasikan untuk kelompok belanja selain belanja pegawai dan barang tersebut.

Grafik 4.3 Proporsi Belanja Konsolidasian Sulawesi Barat Triwulan I 2019

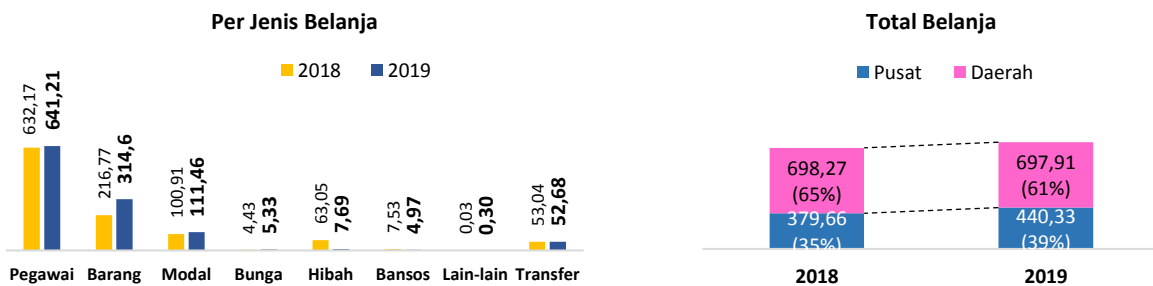


Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar (diolah)

Porsi realisasi belanja modal hanya sebesar 10 persen, seiring dengan belum optimalnya belanja modal pemerintah di awal tahun anggaran. Hal tersebut juga sejalan dengan realisasi pendapatan pajak Sulbar yang masih didominasi oleh PPh, sedangkan realisasi PPN masih minim. Dari sisi PDRB, kondisi dimaksud juga beriringan dengan masih rendahnya kontribusi sektor konstruksi yang biasanya digerakkan secara dominan oleh aktivitas belanja modal pemerintah.

4.3.2 Analisis Perubahan

Grafik 4.4 Perubahan Realisasi Belanja Konsolidasian Sulbar Tw I 2018-2019 (dalam miliar Rupiah)



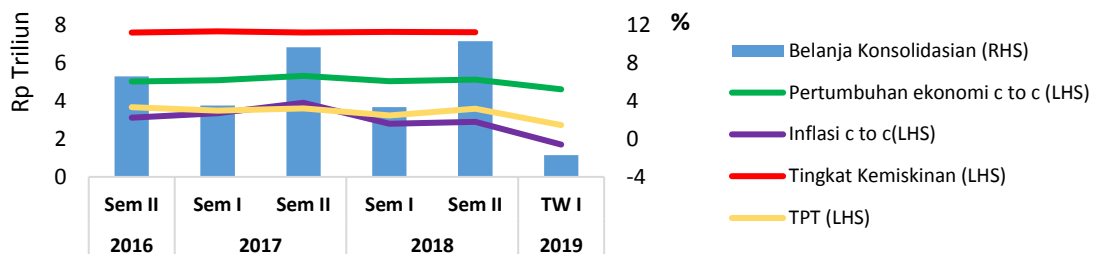
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belanja barang mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 45 persen. Kenaikan tersebut berkorelasi dengan tingginya aktivitas belanja pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah mengalami ekspansi di hampir semua jenis belanja, dengan total kenaikan sebesar Rp60,31 miliar (5,59 persen).

4.3.3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Indikator Ekonomi Regional

Belanja pemerintah lingkup Sulbar memiliki hubungan yang linear dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jumlah dana yang dibelanjakan pemerintah telah ikut

mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar, dan pada saat yang sama inflasi juga ikut terpengaruh pada arah yang sama.

Grafik 4.5 Korelasi Belanja Pemerintah Konsolidasian dengan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Sulbar s.d. Triwulan I 2019



Tingkat pengangguran yang seharusnya memiliki hubungan negatif dengan belanja pemerintah tampak justru mengikuti pola belanja. Demikian pula halnya dengan tingkat kemiskinan yang tampak relatif stabil pada kisaran 11 persen meski dalam periode yang sama berada di tengah fluktuasi belanja pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah belum cukup kuat dalam menekan angka TPT dan tingkat kemiskinan Sulbar.

4.4 Analisis Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB

Berdasarkan data dari Laporan Operasional (LO) GFS Kanwil DJPb Provinsi Sulbar Triwulan I 2019, pengeluaran konsumsi pemerintah Sulbar sebesar Rp956,56 miliar berkontribusi sebesar 9,04 persen terhadap PDRB Sulbar.

Sementara itu, investasi pemerintah sebesar Rp108,15 miliar telah memberi kontribusi

Tabel 4.3 Kontribusi Konsumsi dan Investasi Pemerintah terhadap PDRB (ADHB) Sulbar s.d. Triwulan I 2019 (Rp miliar)

PDRB ADHB	10.581,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	956,56
- Kompensasi Pegawai	636,93
-Penggunaan Barang & Jasa	314,66
-Konsumsi Aset Tetap	-
-Manfaat Sosial	4,97
Investai Pemerintah/PMTB	108,15
-Aset Tetap	108,15
Kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB	9,04%
Kontribusi Insvestasi Pemerintah terhadap PDRB	1,02%

Sumber: LO Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS Provinsi Subar (diolah)

sebesar 1,02 persen terhadap PDRB Sulbar. Masih rendahnya kontribusi pemerintah terhadap PDRB tersebut sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh BPS, yakni hanya berkontribusi sebesar 9,77 persen. Dari sisi pengeluaran, roda perekonomian Sulbar masih digerakkan oleh Konsumsi Rumah Tangga, seiring dengan struktur belanja pemerintah yang masih didominasi oleh belanja pegawai.

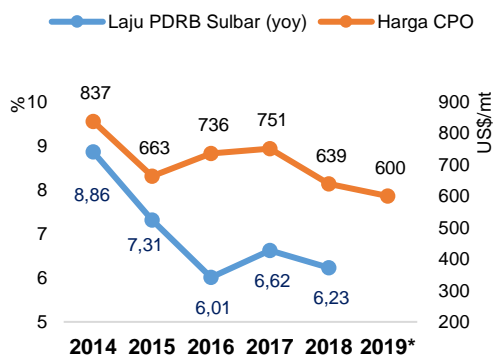
BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

5.1 Tantangan dan Peluang dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulbar di Tengah Volatilitas Harga CPO

Kontribusi subsektor Perkebunan terhadap perekonomian Sulbar tidak dapat dipungkiri. Menurut data BPS Provinsi Sulbar, dalam lima tahun terakhir subsektor tersebut menyumbang rata-rata 19,5 persen terhadap total PDRB (ADHK) Sulbar. Demikian halnya dengan subsektor Industri Makanan dan Minuman yang didominasi oleh industri CPO juga turut memberikan kontribusi sebesar 10 persen. Kontribusi tersebut melebihi sumbangsih lapangan usaha lainnya seperti Perdagangan dan Administrasi Pemerintahan yang tercatat masing-masing sebesar 9,9 persen dan 8,7 persen.

Dibalik peran dominan tersebut, terdapat isu yang patut diantisipasi oleh pemangku kepentingan di Sulbar yakni volatilitas harga komoditas olahan hasil perkebunan khususnya *Crude Palm Oil* (CPO). Peningkatan volume ekspor CPO Sulbar di tahun 2018 sebesar 41,81 persen (*yoy*) tidak dibarengi dengan perbaikan harga CPO yang justru mengalami penurunan sebesar 14,19 persen (*yoy*). Hal tersebut mengindikasikan adanya potensi nilai tambah ekonomi yang hilang seandainya harga CPO lebih terkendali atau mengalami kenaikan. Kondisi tersebut secara tidak langsung turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sulbar yang melambat dari 6,62 persen pada tahun 2017 persen menjadi 6,23 persen pada tahun 2018.

Grafik 5.1 Perkembangan Laju PDRB Sulbar dan Harga CPO



Sumber: BPS Prov. Sulbar, World Bank
Keterangan: *) angka prakiraan World Bank

Selanjutnya, berdasarkan Grafik 5.1 nampak bahwa perkembangan laju PDRB Sulbar linear dengan pergerakan harga CPO di pasar dunia. Pengecualian terjadi pada 2016 dimana laju pertumbuhan ekonomi Sulbar melambat pada saat harga CPO tumbuh 10,9 persen (*yoy*) sebagai imbas dari fenomena *El Nino* yang berpengaruh pada penurunan volume produksi sektor perkebunan dan pengolahan CPO.

Keselarasan antara dinamika harga CPO dan laju pertumbuhan ekonomi Sulbar tersebut menjadi tantangan yang perlu diantisipasi oleh para *stakeholders*. Terlebih lagi, pada tahun 2019 harga CPO diproyeksikan kembali mengalami pelemahan sebesar

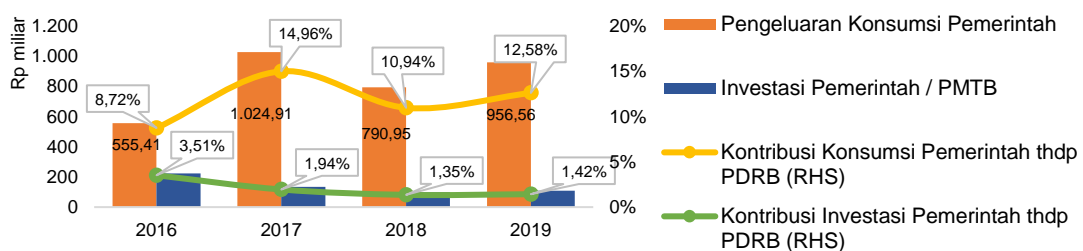
6,05 persen (yoy) ke level US\$600 per metrik ton¹. Dalam rangka mengantisipasi potensi pelambatan laju pertumbuhan ekonomi Sulbar sebagai pengaruh dari pelemahan harga CPO dimaksud, terdapat beberapa peluang yang dapat dioptimalkan.

Dari sisi perdagangan internasional, terdapat peluang untuk menjaga stabilitas pertumbuhan volume dan nilai ekspor CPO Sulbar pada tahun 2019. Berdasarkan data ekspor nonmigas Provinsi Sulbar, nampak bahwa negara-negara tujuan utama ekspor CPO Sulbar berada di kawasan Asia². Hal ini menjadi peluang tersendiri mengingat permintaan CPO dari negara-negara Asia di kawasan masih cukup tinggi di tengah sentimen negatif Uni Eropa terhadap produk olahan kelapa sawit yang dinilai menghilangkan fungsi hutan (*deforestation*).

Oleh karena itu, para pelaku industri CPO di Sulbar perlu mengoptimalkan dan meningkatkan volume produksi dalam rangka mencukupi permintaan dari negara pengimpor CPO. Rantai pasokan Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang memadai dari sektor Perkebunan di Sulbar perlu dijaga di tengah adanya peringatan BMKG terkait potensi *El Nino* yang dapat menimbulkan kekeringan panjang di tahun 2019³.

Sementara itu dari sisi fiskal, dipertahankannya kebijakan defisit anggaran menjadi peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Sulbar. Pada tahun anggaran 2019, defisit APBN lingkup Sulbar mencapai Rp4,27 triliun. Di sisi lain, defisit APBD lingkup Sulbar ditetapkan sebesar Rp88,97 miliar. Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif tersebut diharapkan menjadi kebijakan yang efektif mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar di tengah tren pelambatan dalam dua tahun terakhir.

Grafik 5.2 Perkembangan Kontribusi Pengeluaran Pemerintah lingkup Sulbar s.d. Triwulan I Periode 2016-2019



Lebih lanjut, peran pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) sebagai salah satu kontributor utama terhadap perekonomian Sulbar tercermin pada Grafik 5.3 di atas. Nampak bahwa dinamika pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah pusat

¹ Berdasarkan prakiraan harga CPO dalam *World Bank Commodities Price Forecast* (rilis tanggal 23 April 2019)

² Bank Indonesia, 2019, *SEKDA: Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan di Propinsi Sulawesi Barat* (<https://www.bi.go.id/id/statistik/sekda/StatistikRegionalDetail.aspx?idprov=76>, diakses tanggal 6 Mei 2019)

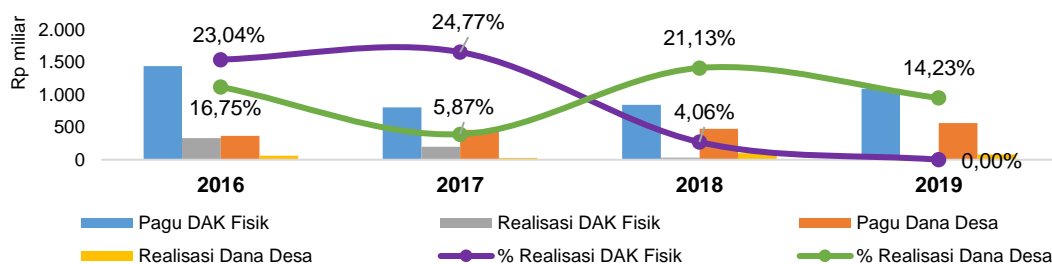
³ Kontan, 2019, *Waspada El Nino 2019 terhadap pertanian dan produksi pangan* (<https://industri.kontan.co.id/news/waspada-el-nino-2019-terhadap-pertanian-dan-produksi-pangan>, diakses tanggal 7 Mei 2019)

dan daerah lingkup Sulbar selaras dengan kontribusi kedua pengeluaran tersebut terhadap total PDRB Sulbar. Berdasarkan korelasi tersebut, peningkatan alokasi belanja pemerintah konsolidasian tahun 2019 sebesar 4,60 persen (*yoy*) pada tahun 2019 dapat dijadikan modal untuk mendorong andil pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Sulbar. Oleh karena itu, satuan kerja pemerintah baik pusat maupun daerah perlu memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran, baik pada kelompok belanja operasional maupun yang bersifat produktif.

Perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah pada dasarnya telah nampak pada triwulan I 2019. Salah satu indikatornya adalah perbaikan kinerja penyerapan anggaran belanja pemerintah. Dibandingkan dengan triwulan I tahun 2018, kinerja penyerapan anggaran belanja konsolidasian lingkup Sulbar meningkat sebesar 0,96 persen. Demikian pula dengan kinerja penyerapan belanja modal konsolidasian triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 6,81 persen (*yoy*). Peningkatan kinerja penyerapan anggaran tersebut menunjukkan adanya potensi peningkatan kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB Sulbar.

Namun demikian, terdapat beberapa isu fiskal yang perlu diantisipasi agar potensi tersebut dapat dioptimalkan. Pertama, terdapat potensi DAK Fisik tahun 2019 tidak tersalur seluruhnya. Tambahan persyaratan penyaluran Tahap I berupa *review* inspektorat daerah atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik tahun 2018⁴ menjadi tantangan yang harus diperhatikan oleh para *stakeholders*. Sampai dengan April 2019, alokasi DAK Fisik lingkup Sulbar belum tersalur. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan kinerja penyerapan anggaran dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yang telah tersalur sebesar Rp34,20 miliar atau 4,06 persen dari pagu.

Grafik 5.3 Perkembangan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa lingkup Sulbar s.d. April 2019



Sumber: MEBE, SIMTRADA DJPK

Selanjutnya, kinerja penyaluran Dana Desa lingkup Sulbar sampai dengan triwulan I tahun 2019 turut mengalami penurunan sebesar 28,86 persen (*yoy*). Hal

⁴ Sebagaimana ketentuan pada Pasal 81 Ayat (1) dalam PMK Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

tersebut berkorelasi dengan hambatan penyaluran Dana Desa Tahap I di Kabupaten Polewali Mandar sehubungan dengan belum diterbitkannya peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kendala-kendala tersebut di atas dapat diselesaikan dengan cara meningkatkan sinergi antar pengelola fiskal di Sulbar. *Focus Group Discussion* (FGD) dapat menjadi forum untuk secara bersama-sama merumuskan alternatif solusi yang tepat guna mengatasi tantangan fiskal tersebut. Selain itu, monitoring dan pengawasan secara periodik dapat diterapkan sebagai alat kontrol agar anggaran pemerintah dapat diserap secara optimal. Dengan demikian, peluang untuk meningkatkan kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian Sulbar dapat direalisasikan agar dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sulbar di tengah volatilitas harga CPO dan dinamika industri pengolahan CPO di wilayah Sulbar.



KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA MAMUJU Lt.3, JALAN SUKARNO HATTA MAMUJU SULAWESI BARAT
TELEPON (0426) 2325023, +62811410026; FAKSIMILI (0426) 2325033
WEBSITE: www.djpbk.kemenkeu.go.id/kanwil/sulbar EMAIL kanwildjpbnsulbar@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : ND-244/WPB.26/2019

Yth. : Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari : Plt. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Sulawesi Barat Triwulan I 2019
Tanggal : 13 Mei 2019

Memenuhi Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, dengan ini disampaikan Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2019 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun *softcopy* laporan dalam bentuk file *pdf* telah disampaikan ke alamat *email* ditpa@kemenkeu.go.id cc lo.ditpa@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Endah Martiningrum

Kp.: BD.02/BD.0201/2019